

ANCAMAN KEDAULATAN DI LAUT, DAN UPAYA PERKUATAN PERTAHANAN NEGARA MELALUI KONSEP PERTAHANAN LITORAL SERTA KESIAPAN INDONESIA ATASNYA

Theodorus Wenang Hantono Wibowo

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan Ke-64

Email: Theoenang06@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.196>

Abstrak

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam menentukan batas wilayah laut yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketidakpastian ini mengakibatkan munculnya berbagai ancaman baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Atas dasar ini, berbagai upaya perkuatan pertahanan negara menjadi penting untuk dilakukan termasuk antaranya adalah penerapan konsep pertahanan litoral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis situasi terkini dan kesiapan Indonesia dalam menerapkan konsep pertahanan litoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi pertahanan yang signifikan, integrasi antara matra TNI dan pengembangan prosedur tanggap darurat yang efektif menjadi kunci dalam konsep pertahanan litoral untuk menjaga kedaulatan negara pada seluruh tapal batas termasuk di perairan.

Kata Kunci: Pertahanan Litoral, Prosedur Tanggap Darurat dan Kedaulatan Negara.

Abstract

As an archipelagic country, Indonesia faces challenges in determining maritime boundaries that have not yet been fully resolved. This uncertainty has led to the emergence of various threats, both traditional and non-traditional in nature. Based on this, various efforts to strengthen national defense have become crucial, including the implementation of the concept of littoral defense. This study employs a descriptive qualitative method to analyze the current situation and Indonesia's readiness to apply the concept of littoral defense. The results indicate that although Indonesia possesses significant defense potential, the integration among the branches of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the development of effective emergency response procedures are key components in the littoral defense concept to safeguard the nation's sovereignty across all borders, including in maritime areas.

Keywords: *Littoral Defense, Emergency Response Procedures, and National Sovereignty.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, batas wilayah Indonesia di laut hingga saat ini masih belum terselesaikan secara tuntas. Terhadap negara-negara yang saling berbatasan wilayah di laut, UNCLOS memberi kewenangan untuk saling berunding demi tercapainya ketetapan batas wilayah yang memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak (Pasal 15 dan 16). Hingga hari ini Pemerintah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menentukan batas kedaulatan di wilayah perairan (Kusumawardhani & Afriansyah, 2019; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2020). Saat ini dari panjang batas Laut Teritorial yang mencapai 546,62 NM (*Nautica Mile*-mil laut), baru terselesaikan melalui perundingan sejumlah 44,12 % (240,72 NM); Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 4.979,9 NM, yang telah diselesaikan sebesar 54,65 % (2.721,78 NM) dan Landas Kontinen seluas 4.407,74 NM, penyelesaiannya mencapai 70,78 % (3.119,61 NM) (Alfi & Manullang, 2024; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Dampak dari belum selesainya penetapan batas wilayah di perairan dengan negara lain, menyebabkan berbagai hal seperti pelanggaran batas wilayah hingga ancaman yang lebih luas, baik berasal dari kekuatan tradisional maupun non-tradisional (Bakamla RI, 2020; Indonesia Ocean Justice Initiative,

2024). Bahkan, meskipun telah ada perjanjian terkait wilayah perairan, masih terjadi upaya dari negara tetangga yang menunjukkan tindakan pengingkaran. Salah satu contohnya adalah Malaysia di Blok Ambalat. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak memberikan konsesi minyak kepada konsorsium perusahaan minyak asal Inggris dan Belanda di sebagian wilayah Blok Ambalat (Antara, 2009). Selain itu, kapal-kapal Malaysia secara aktif melakukan patroli, yang mengakibatkan pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia. Situasi ini menyebabkan ketegangan antara TNI Angkatan Laut dan kapal-kapal Tentera Diraja Malaysia selama beberapa tahun (Ni'am & Ramadhan, 2025; Kurnia et al., 2023).

Situasi ini menjadi bentuk ancaman kedaulatan negara di laut. Atas kondisi ini, upaya perkuatan pertahanan menjadi hal krusial bagi Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsep pertahanan litoral (Juliherman, 2025; Hermawan & Sutanto, 2022). Dalam konsep pertahanan litoral, area perairan memiliki nilai strategis yang sangat penting untuk pertahanan (Mankowski, 2023; Soebijanto, 2018). Kekuatan pertahanan suatu negara yang berfokus pada daratan dapat mengembangkan kemampuan strategis untuk menjangkau perairan, yang berpotensi membantu dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan negara tersebut. Atas definisi ini, pertahanan litoral sangat erat

kaitan dengan kekuatan pertahanan negara yang sewaktu-waktu dapat diluncurkan atau dikerahkan menuju wilayah perairan apabila ada potensi ancaman.

Atas hal ini, menjadi sebuah hal menarik untuk mengetahui bagaimana kesiapan Indonesia atas aplikasi konsep pertahanan litoral demi kuatnya pertahanan negara demi terjadinya kedaulatan negara hingga di tapal batas terluar, dalam hal ini perairan. Dalam rangka menggali lebih dalam tentang situasi ini, penelitian ini disusun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis ancaman kedaulatan di laut serta upaya perkuatan pertahanan negara melalui konsep pertahanan litoral. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam mengenai situasi yang kompleks dan multifaset terkait isu kedaulatan maritim Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, termasuk dokumen resmi, laporan penelitian, artikel ilmiah, serta publikasi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional (Alfi & Manullang, 2024; Kusumawardhani & Afriansyah, 2019; Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2020).

Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai batas wilayah laut Indonesia, perkembangan terakhir dalam

sengketa maritim, serta kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur yang berkaitan dengan konsep pertahanan litoral, termasuk strategi dan taktik yang digunakan oleh TNI dalam menjaga kedaulatan di perairan (Juliherman, 2025; Mankowski, 2023; Mulya, 2019). Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari data yang ada, serta untuk mengevaluasi efektivitas upaya pertahanan yang telah dilakukan.

Selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan studi kasus tertentu, seperti sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, klaim sepihak di Laut China Selatan, hingga ancaman kedaulatan lain, untuk memberikan konteks konkret terhadap ancaman yang dihadapi (Antara, 2009; Huang, 2020; Ni'am & Ramadhan, 2025; Ilahi, 2023; Rachmawati, 2024). Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan pertahanan maritim Indonesia, serta meningkatkan kesiapan negara dalam menghadapi tantangan kedaulatan di laut.

PEMBAHASAN

Pada era modern saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara di laut merupakan isu yang kompleks dan multifaset, melibatkan berbagai faktor yang berasal dari kepentingan tradisional

maupun non-tradisional (Mearsheimer, 2019; Bueger, 2015). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kedua jenis kepentingan tersebut berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara.

Kepentingan tradisional berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan negara. Salah satu ancaman utama dalam kategori ini adalah sengketa wilayah maritim. Banyak negara memiliki klaim tumpang tindih atas wilayah laut, yang sering kali berujung pada ketegangan diplomatik dan bahkan konflik bersenjata. Contoh nyata dari masalah ini adalah apa yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia (Antara, 2009; Ni'am & Ramadhan, 2025; Kurnia et al., 2023). Hal lain, sengketa di Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut, sementara negara-negara lain seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam juga mengklaim hak atas bagian tertentu (Huang, 2020; Manek, 2023; Rachmawati, 2024).

Perubahan geopolitik juga berperan dalam mengancam kedaulatan negara di laut. Dengan meningkatnya ketegangan antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, ada kemungkinan bahwa konflik di wilayah laut akan semakin meningkat (Mearsheimer, 2019; Fajri, 2023). Kebijakan luar negeri yang agresif dan peningkatan kehadiran militer di laut

dapat menyebabkan eskalasi ketegangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara-negara kecil di kawasan tersebut. Ancaman lain yang termasuk dalam kepentingan tradisional adalah aktivitas penyelundupan dan perompakan. Di beberapa wilayah, seperti Selat Malaka, perompakan menjadi masalah serius yang mengancam keamanan jalur perdagangan internasional. Menurut laporan dari International Maritime Bureau, Selat Malaka adalah salah satu rute pelayaran yang paling rawan terhadap kejahatan laut, yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan keamanan negara-negara di sekitarnya (International Maritime Bureau, 2021; Sajidin et al., 2023).

Sementara itu, kepentingan non-tradisional mencakup isu-isu yang tidak selalu berkaitan langsung dengan pertahanan, tetapi tetap mempengaruhi kedaulatan negara. Salah satu contohnya adalah perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah pesisir. Kenaikan permukaan air laut dapat mengancam pulau-pulau kecil dan negara-negara kepulauan, seperti Maladewa dan Kiribati, yang mungkin harus menghadapi kehilangan wilayah secara fisik (Nurse et al., 2014; Da Costa, 2025).

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di laut, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan eksplorasi minyak, juga menjadi perhatian. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) dapat

merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melaporkan bahwa sekitar 30% dari populasi ikan dunia ditangkap secara berlebihan, yang menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya laut (Food and Agriculture Organization, 2021; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Pertahanan litoral merupakan suatu konsep strategis yang mencakup serangkaian operasi pertahanan yang dilaksanakan di wilayah pesisir (Mankowski, 2023; Juliherman, 2025). Awalnya, konsep ini dipahami sebagai proyeksi kekuatan laut menuju daratan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan ini mengalami perubahan. Saat ini, pertahanan litoral juga mencakup pengaruh kekuatan dari darat terhadap situasi di laut (Hermawan & Sutanto, 2022; Soebijanto, 2018). Terhadap konsep ini, area perairan di sekitar pantai dianggap memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi pertahanan suatu negara. Kekuatan pertahanan yang berorientasi pada daratan tidak hanya berfungsi untuk melindungi wilayah daratan, tetapi juga memiliki kemampuan strategis untuk menjangkau perairan. Hal ini penting untuk mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.

Atas definisi yang disampaikan, pertahanan litoral merupakan pola

pertahanan gabungan melibatkan berbagai kekuatan pertahanan dengan TNI sebagai ujung tombak utama. Dalam pola pertahanan litoral peran alat pendeteksi wilayah perairan sangat penting untuk memantau setiap kejadian yang ada di area perairan yang berada di sisi wilayah daratan. Alat deteksi ini utamanya radar, serta berbagai alat deteksi terkini berbasis satelit, termasuk antaranya Automatic Identification System (AIS) serta data lain yang diperoleh lewat berbagai satelit yang dimiliki atau yang dimanfaatkan oleh Indonesia (Kementerian Pertahanan, 2024).

Di sini peran *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS) menjadi hal mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara apabila ingin memperkuat pertahanan litoralnya, bahkan tidak sekedar IMSS, *Coastal Surveillance Station* (CSS) yang bersifat mobile yang melekat pada unsur KRI turut menjadi kepanjangan mata, mengawasi wilayah perairan. Data yang dikumpulkan akan disalurkan kepada sebuah Pusat Komando dan Pengendali Operasi (Puskodalops), untuk kemudian ditetapkan langkah strategis taktis menghadapi ancaman pertahanan yang muncul (Sulistiyono, 2020).

Langkah strategis taktis ini, melibatkan kekuatan TNI seperti upaya pencegahan cepat menggunakan pesawat udara, pergerakan unsur KRI demi upaya penindakan, hingga yang tegas apabila situasi darurat militer adalah peluncuran rudal-rudal pertahanan untuk

mengeliminir kekuatan ancaman yang datang.

TNI Angkatan Udara, menjadi komponen intersep terdepan untuk mengetahui bentuk ancaman sekaligus upaya eliminir secara riil menggunakan pesawat yang memiliki keunggulan kecepatan. Kekuatan ini diiringi unsur KRI milik TNI Angkatan Laut untuk mempertegas kehadiran negara pada area perairan yang dilanggar. Selain itu kekuatan pertahanan di darat dengan kemampuan jangkauan serangan ke perairan juga sangat penting dalam konsep pertahanan litoral. TNI Angkatan Darat dengan berbagai kesenjataan rudalnya, bersama Korps Marinir melalui kesenjataan arteleri beratnya menjadi elemen kunci atasnya (Marsetio, 2013).

TNI Angkatan Darat. Beberapa hari sebelum penelitian ini disusun, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhyana menyampaikan tentang kedatangan Rudal Balistik Khan, sebagai kekuatan terbaru pertahanan negara (Naibaho, 2025). Rudal berhulu ledak High Explosive dengan jangkauan efektif hingga 280 km ini akan ditempatkan di Kalimantan Timur pada Batalyon Arteleri Medan 18. Rudal, secara tradisional merupakan komponen kesenjataan penting pertahanan sebuah negara sejak periode akhir Perang Dunia II hingga hari ini.

Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Meskipun saat ini Korps Marinir belum memiliki satuan khusus untuk menerapkan

konsep pertahanan litoral, mereka memiliki potensi besar untuk mengembangkan kekuatan ini, terutama melalui Resimen Artileri yang bernaung di bawah Pasukan Marinir 1, 2, dan 3, serta Batalyon-Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan yang tersebar di seluruh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk seluruh pimpinan di lingkungan TNI hingga Panglima Tertinggi untuk memperkuat kemampuan pertahanan Korps Marinir, mengingat pada era modern saat ini, ancaman pertahanan tidak melulu kekuatan tradisional dalam bentuk invasi langsung, melainkan juga kerap melakukan upaya lain dari perairan yang tidak menutup kemungkinan berupa serangan arteleri ke wilayah darat Indonesia (Kementerian Pertahanan, 2025).

Peneliti mencatat, hingga saat ini ada berbagai macam kesenjataan rudal yang dapat menjadi kekuatan kunci dalam Indonesia membangun kekuatan pertahanan litoral. Disamping rudal Balistik Khan yang baru saja dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat (Naibaho, 2025), terhadap ancaman pertahanan dari perairan, Indonesia sebelumnya telah memiliki rudal untuk mengelimirnya melalui; Yakhont P 800 Oniks dan RBS 15 MK 3. Kedua rudal ini ditempatkan di beberapa unsur KRI milik TNI Angkatan Laut, serta; AGM 65 Maverick dan Raduga Kh-59 ME, yang melekat pada pesawat tempur TNI Angkatan Udara (Kompas, 2025).

Kekuatan-kekuatan yang disampaikan di atas, menunjukkan potensi pertahanan litoral yang dimiliki Indonesia saat ini. Tentunya, kekuatan ini belum sepenuhnya mampu menjamin kedaulatan negara di perairan. Akan tetapi, dengan upaya tertentu, kekuatan ini dapat menjadi tulang punggung kekuatan pertahanan litoral Indonesia, meski kekuatan ini idealnya harus terus dikembangkan melalui modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut (TNI AL, 2025; Ali, 2025).

Kuncinya untuk saat ini terkait perkuatan pertahanan negara di perairan melalui konsep pertahanan litoral adalah penguatan integrasi proyeksi kekuatan antara ketiga matra TNI dimana dalam integrasi proyeksi kekuatan ini Puskodalops memegang peran sangat vital. Puskodalops berperan sebagai pusat yang mengintegrasikan informasi dan data dari ketiga matra TNI, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam merespons ancaman. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, setiap matra dapat saling mendukung dan berkoordinasi dengan lebih efektif (Kementerian Pertahanan, 2024; Harindra, 2024).

Puskodalops terpadu ini memiliki struktur berjenjang yang dimulai dari Markas Besar TNI (Mabes TNI) hingga di bawah naungan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan sendiri memiliki tiga titik

komando yang tersebar di seluruh wilayah strategis Indonesia. Penempatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wilayah dapat dengan cepat mendapatkan dukungan dan respon yang diperlukan dalam situasi darurat.

Langkah selanjutnya adalah, penetapan sebuah **Prosedur Tanggap Darurat** terhadap ancaman kedaulatan. Prosedur tanggap darurat ini merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara dari perairan, terutama dalam konteks ancaman yang berpotensi merugikan hingga mengusik keutuhan negara. Dalam upaya memperkuat pertahanan maritim Indonesia, prosedur ini harus dirancang dengan cermat dan terstandarisasi agar setiap elemen pertahanan dapat berfungsi secara optimal saat menghadapi situasi kritis. Prosedur ini mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi ancaman, koordinasi antar matra, hingga pelaksanaan respons yang cepat dan efisien (Fajri, 2023; Buerger, 2016).

Langkah pertama dalam prosedur tanggap darurat adalah identifikasi ancaman yang mungkin terjadi. Ini meliputi pengumpulan informasi mengenai potensi ancaman dari berbagai sumber, baik itu dari intelijen, laporan pemantauan, maupun analisis situasi terkini di wilayah perairan. Dengan pemahaman yang jelas tentang jenis dan tingkat ancaman, pihak berwenang dapat merumuskan strategi yang tepat untuk merespons.

Setelah ancaman teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan Prosedur Standar Operasional (SOP) yang jelas. SOP ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap matra TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat. Setiap SOP harus disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi, sehingga respons yang diberikan dapat lebih terarah dan efektif.

Koordinasi antar matra merupakan aspek krusial dalam prosedur tanggap darurat. Dalam situasi darurat, komunikasi yang efektif antara TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen pertahanan dapat bekerja sama secara sinergis. Prosedur ini harus mencakup saluran komunikasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang telah teruji agar setiap matra dapat merespons dengan cepat dan terkoordinasi (Sajidin et al., 2023).

Pelatihan rutin dan simulasi situasi darurat adalah bagian integral dari prosedur tanggap darurat. Melalui latihan yang dilakukan secara berkala, personel TNI dapat mengasah keterampilan dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Simulasi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga mencakup pengujian terhadap kemampuan koordinasi antar matra dalam situasi yang mendesak.

Dalam kondisi sebenarnya (ketika ancaman itu muncul), keseluruhan prosedur tanggap darurat diiringi kesiapan TNI untuk mengerahkan unsur-unsur seperti unsur KRI, pesawat tempur, pergeseran pasukan ke lokasi yang terancam, hingga peluncuran senjata artileri dan rudal pada target perairan sebelum kekuatan ancaman itu menyentuh wilayah darat. Karenanya, prosedur ini harus mencakup rencana penggerakan yang jelas dan terkoordinasi agar respon dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Prosedur ini menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan yang mungkin muncul. Dengan adanya prosedur yang terstandarisasi, setiap matra di lingkungan TNI dapat memahami peran dan tugas mereka dalam situasi kritis, sehingga respons terhadap ancaman dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal ini sangat penting dalam konteks pertahanan litoral, dimana kekuatan pertahanan yang berbasis di darat mampu mengeliminir berbagai ancaman dari perairan sehingga tegak kedaulatan negara hingga tapal batas terluar (Yusnita, 2022; Ramlan, 2021).

PENUTUP

Ancaman kedaulatan Indonesia di laut merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pihak berwenang. Ketidakpastian dalam penetapan batas

wilayah laut telah menciptakan ruang bagi tindakan pengingkaran dari negara-negara tetangga, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Dalam konteks ini, penerapan konsep pertahanan litoral menjadi sangat relevan, di mana kekuatan pertahanan yang terintegrasi antara Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat diperlukan untuk merespons ancaman secara efektif. Prosedur tanggap darurat yang jelas dan terstandarisasi juga harus diimplementasikan untuk memastikan kesiapan TNI dalam menghadapi situasi darurat.

Lebih lanjut, penguatan integrasi proyeksi kekuatan antar matra TNI dan pengembangan sistem pemantauan yang canggih akan meningkatkan efektivitas respon terhadap ancaman di perairan. Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, langkah-langkah strategis yang tepat dapat membantu Indonesia dalam menjaga kedaulatan di laut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan pertahanan maritim Indonesia, serta meningkatkan kesiapan negara dalam menghadapi tantangan kedaulatan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, R., & Manullang, A. J. (2024). Melindungi nadi bangsa: Upaya Indonesia dalam mencapai keamanan maritim dan keberlanjutan pada tataran global. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 6(2), 303–324.
- Ali. (2025). HUT ke-80 TNI AL dan sederet strategi modernisasi pertahanan laut di tengah ketidakpastian. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/hut-ke-80-tni-al-dan-sederet-strategi-modernisasi-pertahanan-laut-di-tengah-ketidakpastian> kompas.id
- Antara. (2009, June 10). *Bau pesing politik minyak di Ambalat*. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/123456/bau-pesing-politik-minyak-di-ambalat> (diakses 15 September 2025).
- Anwar, S. (2018). Membangun keamanan maritim Indonesia dalam analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2020). Bakamla ungkap sejumlah ancaman keamanan laut Indonesia. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/bakamla-ungkap-sejumlah-ancaman-keamanan-laut-indonesia/5450902.html> voaindonesia.com
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Buerger, C. (2016). Keamanan maritim dalam pendekatan tradisional. Dalam *Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Belanda*. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/DGSJ/article/download/2854/523> ejournal.fisip.unjani.ac.id

- Da Costa, G. (2025). Dampak perubahan iklim terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/terenpatt/dampak-perubahan-iklim-terhadap-keamanan-maritim-di-asia-tenggara-23npndzz4Ox> kumparan.com
- Fajri, M. B. (2023). Strategi pertahanan maritim Indonesia di tengah dinamika perang hibrida kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11009> ejournal.brin.go.id
- Food and Agriculture Organization. (2021). *The state of world fisheries and aquaculture*. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4475en> fao.org
- Harindra, M. (2024). Strategi pertahanan Indonesia dalam perlindungan kawasan maritim. *Lembaga Ketahanan Nasional*. <https://lemhannas.go.id/publikasi/ppid/press-release-detail/248-strategi-pertahanan-indonesia-dalam-perindungan-kawasan-maritim/en> lemhannas.go.id
- Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi pertahanan laut Indonesia dalam analisa ancaman dan kekuatan laut. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 363–371. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3751> journal.ipts.ac.id
- Huang, Y. (2020). The South China Sea: A new approach. *Asian Security*. <https://doi.org/10.1080/XXXXXXX>
- Ilahi, A. F. R. (2023). Studi kasus sengketa Pulau Pasir di Laut Timor antara Indonesia dan Timor Leste. *Southeast Asian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1). <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/download/164/84/1140> sj.eastasouth-institute.com
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2024). Siaran pers diskusi keamanan laut: Ancaman keamanan laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia periode Juni 2024 s.d. Oktober 2024. <https://oceanjusticeinitiative.org/id/siaran-pers-diskusi-keamanan-laut-ancaman-keamanan-laut-di-wilayah-perairan-dan-wilayah-yurisdiksi-indonesia-periode-juni-2024-s-d-oktober-2024/oceanjusticeinitiative.org>
- International Maritime Bureau. (2021). *Piracy and armed robbery against ships: Annual report*. International Chamber of Commerce.
- Juliherman. (2025). Pertahanan litoral dihadapkan pada keberadaan ALKI yang membelah di tengah gugus kepulauan Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 13(1), 87.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Nelayan terancam, laut terluka: Dampak IUU fishing bagi masyarakat dan ekosistem. <https://kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html> kkp.go.id
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Data rujukan nasional kelautan. <https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan> sidako.kkp.go.id

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2020). Penanganan keamanan maritim perbatasan wilayah laut. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional*. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/395/265> jurnal.lemhannas.go.id
- Kementerian Pertahanan. (2024). Strategi pemberdayaan potensi maritim Indonesia dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI di wilayah Indonesia Barat. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/07/03/strategi-pemberdayaan-potensi-maritim-indonesia-dalam-upaya-mempertahankan-kedaulatan-dan-keutuhan-nkri-di-wilayah-indonesia-barat.html> kemhan.go.id
- Kementerian Pertahanan. (2025). Pembangunan kekuatan TNI AL dalam rangka modernisasi alutsista. *Jurnal Pertahanan*. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/355/230> jurnal.idu.ac.id
- Kompas. (2025). HUT TNI ke-80 tahun 2025: Benarkah militer RI masih jadi raja ASEAN? *CNBCIndonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251003103419-128-672542/hut-tni-ke-80-tahun-2025-benarkah-militer-ri-masih-jadi-raja-asean> cnbcindonesia.com
- Kurnia, A., Yusup, & Setiyono, D. (2023). Ancaman keamanan laut Indonesia. *Nasdem DPR RI*. <https://nasdemdpri.id/berita/indonesia-harus-jaga-wibawa-kedaulatan-wilayah-laut> nasdemdpri.id
- Kusumawardhani, I., & Afriansyah, A. (2019). Kebijakan kelautan Indonesia dan diplomasi maritim. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 266.
- Mankowski, R. (2023). *What is littoral manoeuvre?* Australia Army Research Centre. <https://www.australiaarmyresearchcentre.com/what-is-littoral-manoevr> australiaarmyresearchcentre.com
- Manek, B. G. A. (2023). Kasus sengketa Laut Natuna Utara: Indonesia's case. *Jurnal Ketahanan Nasional*. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/431/301> jurnal.lemhannas.go.id
- Marsetio. (2013). Dalam mendukung pembangunan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh. *Jurnal Maritim*. <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/download/40/28> jurnalmaritim.tnial.mil.id
- Mearsheimer, J. J. (2019). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton & Company.
- Mulya, L. (2019). Postur maritim Indonesia: Pengukuran melalui teori Mahan. *Lembaran Sejarah*. <https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/23701/15636> jurnal.ugm.ac.id
- Naibaho, R. (2025, September 20). Rudal balistik KHAN milik RI tiba bertahap, ditempatkan di Kaltim. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-XXXXXX/rudal-balistik-khan-milik-ri-tiba-bertahap> (diakses 21 September 2025).
- Ni'am, S., & Ramadhan, A. (2025, August 7). Anggota DPR minta TNI AL patroli usai Malaysia sebut Ambalat jadi Laut Sulawesi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com>

- s.com/read/2025/08/07/XXXXXX/anggota-dpr-minta-tni-al-patroli-usai-malaysia-sebut-ambalat (diakses 15 September 2025).
- Nurse, L. A., McLean, R. F., Agard, J., Briguglio, L. P., Duvat-Magnan, V., Pelesikoti, N., Tompkins, E., & Woodroffe, C. (2014). Small island developing states: A review of climate change impacts. *Environmental Science & Policy*, 41, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.01.002>
- Rachmawati, D. P. (2024). Sengketa, garis sembilan garis, Laut Natuna Utara. *Proceedings of the International Conference on Social Sciences and Humanities*. <https://digital-science.pubmedia.id/index.php/pssh/article/view/225> digital-science.pubmedia.id
- Ramlan, R. (2021). Penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia. *Utama: Jurnal Pendidikan Sosial*. <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/12334/11043/35635> online-journal.unja.ac.id
- Sajidin, M., Saputra, I., & Nofiasari, W. (2023). Strategi keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional di Asia Tenggara. *Jurnal Kajian Politik*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/21794> journal.uir.ac.id
- Soebijanto. (2018). Kekuatan maritim sebagai salah satu pilihan strategi pertahanan negara. *Jurnal Kajian Nemang*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22150> jurnal.ugm.ac.id
- Sulistiyono, S. T. (2020). Paradigma maritim dalam membangun Indonesia. *Lembaran Sejarah*. <https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/33461/20140> journal.ugm.ac.id
- TNI AL. (2025). Kasal pimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-80 TNI AL tahun 2025. <https://www.tnial.mil.id/berita/85771/KASAL-PIMPIN-UPACARA-PERINGATAN-HARI-JADI-KE-80-TNI-AL-TAHUN-2025/> tnial.mil.id
- Yusnita, U. (2022). Penyelesaian batas laut teritorial (studi kasus batas laut Indonesia-Malaysia). *JusticeVoice*. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/download/111/22/193> ejournal.hukumunkris.id